



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 12 /POJK.05/2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK*).....
Jl
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPSPT LKM/LKMS*)tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan modal, yaitu:

	Lama	Baru
Modal dasar
Modal disetor

Lama			Baru		
Nama Pemegang Saham	Nilai saham		Nama Pemegang Saham	Nilai saham	
	Rp	%		Rp	%
.....	
.....	

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan modal yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang;
2. Data pemegang saham:
 - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 - 1) 1(satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) daftar riwayat hidup; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
 - b. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan*) wajib dilampiri dengan:
 - 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan*);
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau

laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;

- 3) dokumen bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan*) dan/atau koperasi berupa:
 1. 1(satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
 3. daftar riwayat hidup.
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
- c. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*), dokumen yang dilampirkan adalah berupa keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*) terkait penyertaan modal pada LKM.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

MULIAMAN D. HADAD

Ttd.

Tini Kustini